



MENGGALANG AKSI PENANGGULANGAN STUNTING DI MASYARAKAT AKAR RUMPUT

Oleh: Martha Irene Kartasurya & Suyatno

Ringkasan Eksekutif

Upaya menggalang aksi penanggulangan stunting agar sampai di akar rumput dapat dilakukan dengan membangun paradigma di masyarakat bahwa stunting adalah masalah kesehatan bersama, yang merupakan penentu kapasitas SDM di masa mendatang sehingga harus ditangani bersama semua pemangku kepentingan terutama masyarakat sendiri. Pemecahan masalah dilakukan secara berkesinambungan mulai dari menganalisis penyebab stunting dan mencari alternative penanggulangan dan pencegahannya serta pelaksanaan program yang merupakan upaya bersama termasuk masyarakat di semua level dari tingkat nasional, provinsi, kabupaten, kecamatan dan desa. Dukungan regulasi berupa peraturan bupati dan peraturan desa akan sangat mendukung.

Pendahuluan

Indonesia hingga kini masih menghadapi permasalahan gizi yang dapat berdampak serius pada kualitas sumber daya manusia. Salah satu masalah gizi yang menjadi fokus perhatian pemerintah saat ini adalah masalah anak pendek (stunting). Berbagai program dan upaya sudah banyak dilakukan oleh pemerintah, tetapi belum menunjukkan hasil yang menggembirakan. Prevalensi stunting selama 10 tahun terakhir menunjukkan tidak adanya perubahan yang signifikan. Hasil Riset Kesehatan Dasar (Riskesdas) 2018 menunjukkan 30,8% atau sekitar 7 juta balita menderita stunting.

Upaya penurunan stunting memerlukan intervensi yang terpadu, mencakup intervensi gizi spesifik dan gizi sensitif. Sejalan dengan inisiatif percepatan penurunan stunting, pemerintah telah meluncurkan Gerakan Nasional Percepatan Perbaikan Gizi (Gernas PPG) yang ditetapkan melalui Peraturan Presiden Nomor 42 tahun 2013 tentang Gernas PPG dalam kerangka 1.000 HPK. Selain itu, indikator dan target penurunan stunting juga telah dimasukkan sebagai sasaran pembangunan nasional dan tertuang dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2015-2019 dan Rencana Aksi Nasional Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (TPB) 2017-2019.

Rencana aksi penurunan stunting terintegrasi yang berhasil digalang di tingkat nasional, perlu didorong menjadi gerakan di tingkat akar rumput, sampai dengan di lapisan masyarakat terbawah yaitu di desa/kelurahan. Dengan demikian program Intervensi Penurunan Stunting Terintegrasi sebagaimana digagas oleh pemerintah dapat membumi sampai di tataran operasional di pemerintahan desa/kelurahan.

Permasalahan

Implementasi intervensi penurunan stunting terintegrasi⁴ untuk sampai ke level desa/kelurahan tidak mudah. Berdasarkan hasil kajian di Kabupaten Demak Provinsi Jawa Tengah, satu dari 160 kabupaten/kota lokus prioritas penanggulangan stunting di Indonesia, ditemukan sejumlah permasalahan yang berpotensi menjadi hambatan dalam pelaksanaan intervensi stunting terintegrasi, diantaranya:

1. Pengetahuan masyarakat tentang stunting masih rendah:
 - a. Sebagian masyarakat di level desa/kelurahan menganggap anak pendek (stunting) bukan sebagai masalah.
 - b. Masyarakat menganggap bahwa pengukuran tinggi badan anak belum dilakukan secara rutin, karena sejak dahulu mereka sudah terbiasa dengan kegiatan penimbangan di posyandu.
 - c. Tidak cukupnya cakupan intervensi komunikasi dan pendidikan yang berkesinambungan untuk mempromosikan perilaku gizi yang positif sampai di level desa/kelurahan.
2. Rendahnya kapasitas SDM untuk kegiatan analisis penyebab stunting dan penyusunan program penanggulangannya:
 - a. Penyusunan dan penentuan program penanggulangan stunting di kabupaten (APBD) dan juga di level desa (APB-Des) belum didasarkan hasil *problem solving cycle* (siklus solusi masalah), dan masih berupa hasil “*copy-paste*” dari program tahun sebelumnya
 - b. Adanya keterbatasan kemampuan pemangku program di OPD kabupaten, kecamatan dan desa yang menyebabkan faktor determinan spesifik penyebab stunting di setiap desa tidak terpetakan dan masih banyak faktor penyebab masalah belum tersentuh program intervensi.
3. Penanggulangan stunting belum menjadi prioritas program di desa/kelurahan:
 - a. Program aksi penanggulangan stunting terintegrasi di desa membutuhkan bantuan/peran serta kader, namun hal ini akan menambah beban pada kader yang ada di desa/kelurahan.
 - b. Luaran gizi belum menjadi perhatian baik oleh sektor kesehatan maupun sektor lain, sehingga kebijakan dan program-program non kesehatan belum diarahkan menjadi bagian dari intervensi gizi sensitif (*nutrition-sensitive*)
 - c. Masih dibutuhkan dukungan kebijakan/regulasi yang tegas dan pengawalan dari OPD/kabupaten terkait agar APBD dan APBDes memberi alokasi yang memadai untuk upaya penanggulangan stunting di semua desa/kelurahan yang ada di wilayah kabupaten.
 - d. Penyusunan anggaran belanja dan belanja desa (APBDes) masih dominan ditentukan oleh komitmen kepala desa, dan selama ini masih banyak berorientasi kepada pembangunan fisik.



Rekomendasi Strategi

Agar implementasi intervensi penurunan stunting terintegrasi dapat berhasil dengan baik sampai ke level desa/kelurahan, maka diperlukan strategi kebijakan berupa:

1. Membangun mindset di masyarakat bahwa anak pendek (stunting) sebagai masalah kesehatan, melalui: intervensi KIE berkesinambungan sampai di level desa melalui berbagai cara dan beragam saluran.
2. Peningkatan kapasitas SDM di tingkat kabupaten, kecamatan dan desa dalam melakukan analisis penyebab stunting dan penyusunan program penanggulangannya, dengan cara:
 - a. Meningkatkan kemampuan pemangku program di OPD Kabupaten/Kota, kecamatan dan desa melalui pelatihan atau pendampingan dari perguruan tinggi pada saat kegiatan analisis permasalahan dan penyusunan program intervensi.
 - b. Bappeda perlu mengawal agar setiap pengusulan program/intervensi harus didasarkan pada hasil kajian analisis masalah yang benar dan tepat.
3. Mendorong program intervensi penanggulangan stunting menjadi salah satu prioritas program di desa/kelurahan, dengan cara:
 - a. Pembentukan kader stunting atau kader pembangunan manusia yang khusus membantu menangani masalah gizi (stunting) di desa/kelurahan dengan didukung dana operasional dari APBD atau APBDes.
 - b. Mendorong terbitnya peraturan bupati yang dapat menjadi pijakan dan mengikat seluruh komponen OPD di kabupaten sampai ke pemerintahan desa untuk memberi prioritas anggaran untuk penanggulangan stunting dan menjadikan luaran gizi sebagai tolok ukur keberhasilan intervensi gizi spesifik dan sensitive, bukan hanya sebatas terlaksananya kegiatan/projek
 - c. Pemerintah daerah (melalui Bappeda) perlu mengawal agar program intervensi penanggulangan stunting terintegrasi masuk dalam APBD dan APBDes dengan anggaran yang memadai.
 - d. Pemerintah desa perlu didampingi agar mampu melakukan sinkronisasi perencanaan dan penganggaran program pembangunan desa untuk mendukung penanggulangan stunting, serta jika diperlukan dituangkan dalam peraturan desa.



Daftar Pustaka:

1. Tomkins A, Watson F. Malnutrition and Infection - A review - Nutrition policy discussion paper No. 5. *Nutrition*. 1989;(5).
2. Berkman DS, Lescano AG, Gilman RH, Lopez SL, Black MM. Effects of stunting, diarrhoeal disease, and parasitic infection during infancy on cognition in late childhood: A follow-up study. *Lancet*. 2002. doi:10.1016/S0140-6736(02)07744-9.
3. SUN Movement. Scaling Up Nutrition (SUN) Movement Strategy [2012-2015]. *Imp Coll London*. 2012;1(September 2012):7-10. doi:10.1596/978-0-8213-8077-2.
4. Bappenas KP. Intervensi Penurunan Stunting. 2018;(November).



Alamat Penulis:
Bagian Gizi Kesehatan Masyarakat
Fakultas Kesehatan Masyarakat Universitas Diponegoro, Semarang
Alamat: Jl. Prof Soedarto, SH, Tembalang Semarang
Email: mkartasurya64@gmail.com